

BAB VII

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Kelompok etnis dan identitas kelompok etnis merupakan dua hal yang inheren, saling berkaitan. Artinya setiap etnis pasti memiliki identitas, sedangkan identitas etnis hakekatnya adalah tanda (*sign*) yang didasari oleh adanya identifikasi diri dari anggota kelompok etnis itu sendiri. Salah satu kelompok etnis tersebut adalah etnis Alas, yang memiliki identitas etnis dan diakui sebagai *tandene* (tanda) untuk membedakannya dengan kelompok etnis lainnya. Identitas tersebut berupa identitas kelompok yang berdasarkan marga, kekerabatan, dan komunitas. Sebab dalam etnis Alas ditemukan tiga pengelompokan warganya, sekaligus melahirkan identitas-identitas kelompok masing-masing.

7.1. Kesimpulan

Identitas kelompok yang terdapat pada etnis Alas di kabupaten Aceh Tenggara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), khususnya di desa Kutambaru dan Kutambaru Bencawan, telah mendasari berbagai kegiatan warganya, baik sebelum dan sesudah berlangsungnya pemekaran desa. Salah satu diantaranya adalah pengukuhan nama desa hasil pemekaran, yaitu adanya aktualisasi identitas kelompok *Khumah Bencawan* menjadi identitas *Kute Kutambaru Bencawan* melalui pemekaran desa. Aktualisasi identitas kelompok ini sarat dengan muatan kepentingan kelompok. Artinya pertimbangan kelompok lebih dikedepankan daripada tujuan pemekaran itu

sendiri, pemisahan desa lebih dikarenakan oleh pemisahan kelompok, yang secara identitas dan karakteristik memang berbeda.

Tujuan pemekaran daerah hakekatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya melalui pelaksanaan pembangunan perekonomian dan pengelolaan potensi daerah, dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat setempat. Sedangkan realita pemekaran desa dalam penelitian ini lebih mengutamakan aktualisasi identitas kelompok semata, yaitu bagaimana setiap kelompok memperjuangkan kepentingannya untuk bisa lebih tampil ke permukaan saja, tanpa dibarengi dengan upaya-upaya konkrit peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bersama, malah terkesan sekedar berpisah secara administratif belaka. Sebab potensi bersama yang dimiliki warga selama ini telah terkotak-kotak akibat pemekaran itu sendiri.

Pertimbangan identitas kelompok yang berkaitan dengan kepentingan kelompok lebih dikarenakan oleh pengelompokan warga desa selama ini. Kelompok-kelompok tersebut menjadi pertimbangan warga dalam berbagai hal, termasuk dalam memekarkan desa. Adapun kelompok yang dimaksud adalah, pertama, *mekhge* (marga), adalah kelompok yang berdasarkan satu marga dan diakui berasal dari keturunan yang sama, tetapi belum tentu satu kelompok kekerabatan dan komunitas. Kedua, *khumah* (kekerabatan), adalah kelompok yang berdasarkan satu kekerabatan dan diakui berasal dari keturunan yang sama dan bisa berbeda, karena itu belum tentu satu marga dan satu komunitas dalam satu kelompok kekerabatan. Ketiga, *umpuk* (komunitas), adalah kelompok yang berdasarkan satu lokasi tempat tinggal secara

teritorial diakui berasal dari keturunan yang sama dan bisa berbeda, karena itu belum tentu satu marga dan satu kelompok kekerabatan dalam satu kelompok komunitas.

Dengan demikian pertimbangan identitas kelompok dalam memekarkan desa sesungguhnya tidak terlepas dari pertimbangan pembagian tiga kelompok dalam etnis Alas diatas. Kelompok berdasarkan marga menghadirkan aktualisasi identitas berdasarkan marga, kelompok berdasarkan kekerabatan menghadirkan aktualisasi identitas berdasarkan kekerabatan, dan kelompok komunitas menghadirkan aktualisasi identitas berdasarkan komunitas. Namun ketiga aktualisasi identitas tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah, sebab ketiganya saling berkaitan. Dengan kata lain, aktualisasi identitas marga berarti dengan sendirinya aktualisasi identitas kekerabatan dan komunitas. Misalnya pengukuhan identitas Bencawan dengan sendirinya pengukuhan identitas marga Selian dan komunitas Kenjulu.

Kemudian yang menjadi latar belakang lain sehingga pemekaran desa diwarnai oleh persoalan kepentingan kelompok adalah, ditemukannya paling tidak tiga kegunaan identitas kelompok pada etnis Alas. Pertama, *tandene* (tanda), yaitu tanda yang digunakan untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kedua, *metohi asal usul* (mengetahui asal usul), yaitu alat yang dipergunakan untuk mempermudah mengetahui asal usul keturunan setiap kelompok. Ketiga, *nehusken adat* (pelestarian adat istiadat), yaitu sebagai salah satu sarana yang dipakai untuk melestarikan adat istiadat Alas. Kegunaan tersebut dianggap dan diakui sebagai suatu yang harus dipertahankan eksistensinya, seperti kewajiban mencantumkan marga, menggunakan bahasa Alas, mematuhi dan menjalankan adat Alas, pantangan kelompok dan lain sebagainya. Upaya mempertahankan identitas

kelompok ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik keagamaan, adat istiadat dan sosial kemasyarakatan lainnya. Salah satu diantaranya adalah aktualisasi identitas kelompok melalui kegiatan pemekaran desa.

7.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang menggunakan kajian teori etnisitas dan otonomi, maka persoalan etnisitas dalam otonomi daerah, khususnya aktualisasi identitas kelompok pada etnis Alas melalui pemekaran desa, berimplikasi terhadap beberapa hal, antara lain ketimpangan antara tujuan pemekaran dengan pemahaman masyarakat terhadap hakekat pemekaran daerah, yaitu konsepsi pemekaran dipahami sebagai suatu kesempatan mengedepankan kepentingan kelompok daripada upaya pencapaian kesejahteraan bersama. Setiap kelompok merasa diberi peluang untuk mengekspresikan identitas kelompoknya ditengah kelompok lain sebagai wujud aktualisasi kelompok melalui pemekaran desa.

Berikutnya semakin terbelahnya kelompok warga desa kedalam bentuk kelompok yang lebih sempit. Sebab pemekaran desa yang mempertimbangkan kelompok, berarti ada kelompok merasa diuntungkan dan dirugikan secara status dan kedudukan sebagai warga desa, dimana selama ini ada perasaan satu kelompok bersama, berubah menjadi kelompok yang berbeda. Artinya kelompok yang menduduki jabatan tertentu akibat pemekaran tersebut merasa diuntungkan, sedangkan kelompok yang tidak mendapat posisi tertentu, merasa dirugikan secara politis, yang pada gilirannya menghadirkan kelompok-kelompok terpisah, ketidakutuhan kelompok dan terganggunya interaksi antara kelompok.

Implikasi lain adalah dimungkinkan terjadinya persaingan antara kelompok, yaitu setiap kelompok terdorong melakukan saling menjatuhkan atau saling memperebutkan setiap peluang yang ada. Misalnya posisi pimpinan desa, dusun, adat, agama, mesjid dan lain-lain. Bukan hanya itu bisa juga dalam hal menentukan berbagai program dan pelaksanaan pembangunan desa, kesempatan menerima bantuan berupa modal usaha, penyuluhan atau pelatihan dan lain-lain, dimana muncul berbagai kepentingan kelompok bahkan pribadi didalamnya. Kondisi ini dapat diamati malah menimbulkan konflik antara kelompok, sebab masing-masing kelompok ingin memperoleh kesempatan tersebut.

Kemudian aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa memungkinkan berimplikasi juga terhadap peningkatan interaksi antara kelompok, yakni diharapkan adanya kerjasama yang lebih baik demi kemajuan desa keseluruhannya. Sebab selama ini adanya perasaan terikat dengan kelompok lain dan adanya dominasi kelompok tertentu, dengan sendirinya telah hilang dan merasa bebas atau mandiri. Keadaan ini memungkinkan adanya persaingan dalam arti kompetensi demi kemajuan desa. Potensi kebersamaan sebelum pemekaran setidaknya masih dapat menggugah keinginan setiap kelompok untuk bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

7.3. Saran

Aktualisasi identitas kelompok bukan hanya dalam pengukuhan nama desa, bahkan dalam berbagai kegiatan lain setelah pemisahan desa, yang dapat terjadi terus menerus, karena ada kecenderungan setiap kelompok tetap ingin mempertahankan

identitas mereka dengan mengungkapkan dan mengukuhkannya melalui berbagai kesempatan, termasuk proses pemekaran desa. Berkaitan dengan itu penulis menyarankan agar :

1. Menjadikan identitas kelompok sebagai tanda untuk membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain, bukan sebagai dasar utama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kesempatan masyarakat sehingga dapat menghindari dampak yang kurang baik dari perbedaan identitas tersebut, seperti mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat yang lebih luas
2. Mempertahankan identitas kelompok untuk memperkuat potensi kelompok dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga dapat mempercepat tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk kemajuan dan kesejahteraan kelompok tertentu
3. Menempatkan aktualisasi identitas kelompok melalui pemekaran desa secara proporsional, yaitu sejalan dengan hakekat dan tujuan awal yang terkandung dalam otonomi itu sendiri, sebagai pemberdayaan nilai-nilai lokal untuk kesejahteraan rakyat, sehingga nilai-nilai tersebut tidak tergilas oleh pengaruh budaya luar yang tidak mendukung kemajuan desa
4. Memanfaatkan peluang otonomi (dibaca : pemekaran desa) untuk menggali, menemukan, dan menjalankan nilai-nilai tradisional etnis Alas, seperti *peleng akhi* (kerjasama), *kendukhi benih* (pemberkatan bibit pertanian), *sejengu'en* (silaturrehmi), *melulukh* (keramahtamahan), *pakat* (musyawarah), *bahani*

situhune (kerja keras), *megukhu* (belajar) dan lain-lain untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan warga desa

5. Merekomendasikan kepada pihak tertentu yang berkompeten agar melakukan penelitian lanjutan untuk menemukan lebih mendalam lagi tentang persoalan etnisitas dalam otonomi daerah, termasuk persoalan identitas kelompok pada etnis Alas dalam pemekaran desa di kabupaten Aceh Tenggara, maupun pada etnis dan daerah yang lain, sehingga dapat dihindari muatan etnis atau kelompok dalam memekarkan daerah, yang malah bisa menimbulkan kepentingan kelompok lebih menonjol daripada kepentingan yang ada dalam tujuan pemekaran itu sendiri.